

ABSTRAK

Nur Indah Sari, Aisyah. 2022. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Bersih Di Desa Argosari Kecamatan Singkut*. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FKIP, Universitas Jambi. Pembimbing (1) Drs. Irzal Anderson, M.Si. Pembimbing (2) Heri Usanto, M.Pd.

Kata Kunci : Efektivitas, Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Pelayanan Publik.

Masalah dalam penelitian ini adalah masih adanya pemungutan dari aparatur desa Argosari kepada masyarakat Desa Argosari dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya dalam pengurusan surat-surat administrasi kependudukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih di Desa Argosari Kecamatan Singkut.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan 4 tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Penelitian ini dilaksanakan dengan 4 kali tahap, yang pertama tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan lapangan, ketiga tahap analisis data, dan yang keempat tahap penulisan laporan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan (1) Belum sepenuhnya pelaksanaan pelayanan publik di Desa Argosari dilakukan secara transparan oleh aparatur desa terhadap masyarakat Desa Argosari. Aparatur tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan pelayanan yang baik sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas. (2) Belum sepenuhnya masyarakat paham tentang pembentukan peraturan desa terutama keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51. Yang mana dalam aturan ini tertera ketentuan hak aparatur yang harus dijalankan sebagai pamong pemerintahan. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung tidak menyadari bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur ternyata belum sesuai dengan peraturan yang ada.